

Jurnal HAM merupakan sebuah platform ilmiah yang bertujuan untuk mendiseminasikan dan mengembangkan hasil-hasil riset hak asasi manusia baik pada tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Mengingat studi hak asasi manusia banyak melibatkan elemen-elemen keilmuan yang bersifat interdisipliner, Jurnal HAM menerima submisi artikel ilmiah yang membahas hak asasi manusia dari lensa, namun tidak terbatas pada ilmu hukum, ilmu sosial, politik, bahasa, hubungan internasional, hingga komunikasi. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 36/E/KPT/2019 tentang Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode VII Tahun 2019 tanggal 13 Desember 2019, menetapkan bahwa Jurnal HAM mendapatkan peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Peringkat 2 (dua) atau Sinta-2 (S2).

- Pembina : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
- Penanggung Jawab : Kepala Pusat Pengembangan Data dan Informasi Penelitian Hukum dan HAM
- Pengarah : 1. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM;
2. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum;
3. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia;
4. Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan;
- Pemimpin Redaksi
(*Editor*) : Harison Citrawan Damanik, S.H., LL.M.
- Anggota Dewan Redaksi
(*Section Editor*) : 1. Dr. Eka N.A.M. Sihombing, S.H., M.Hum.
2. Dr. Irawati Handayani, S.H., LL.M
3. Ahyar, S.H., M.H.
4. Firdaus, S.Sos., M.H.
5. Oki Wahyu Budijanto, S.E., M.M.
6. Tony Yuri Rahmanto, S.H., M.H.
7. Okky Chahyo Nugroho, S.H., M.Si.
8. Donny Michael, S.H., M.H.
- Redaksi Pelaksana : Fitriyani, S.H., M.Si.
- Sekretaris : 1. Lindung Budi Mulyawan, S.H.
2. M. Virsyah Jayadilaga, S.Si., M.P.
3. Claudia Valeriana Gregorius, S.S., S.H., M.M.
- Journal Manager dan Layoter* : 1. Lindung Budi Mulyawan, S.H.
2. M. Virsyah Jayadilaga, S.Si., M.P.
- Penyunting Tata Bahasa dan Naskah
(*Copyeditor*) : 1. B. Lora Christyanti, S.I.P.
2. Novzel Ridho Abednego Hasugian, S.I.P.
3. Mira Sukmawati, S.I.P.
4. Amirah Balqis, S.H.

Teknologi Sistem Informasi : 1. Agus Priyatna, S.Kom.
2. Harysandy Permana, S.Kom.
3. Adi Octaviantara, A.Md.

Alamat Redaksi

Gedung Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Jl. HR Rasuna Said Kav. 4-5 Kuningan, Jakarta Selatan (12940)
Telepon (021) 2525015 (ext. 514); (021) 2522952; Faksimile (021) 2522952
E-mail: ejournalham@gmail.com / pusbangdatin@gmail.com

Percetakan

PT. Pohon Cahaya Jl. Mandala Raya Selatan No. 20 A-B
Jakarta Barat, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan 11440
Telepon: 081391694388

Catatan

Redaksi menerima naskah asli yang aktual dalam bidang Hak Asasi Manusia berupa hasil penelitian dari berbagai kalangan, seperti: Peneliti Hak Asasi Manusia, praktisi dan teoritis serta kalangan lainnya. Tulisan-tulisan yang dimuat merupakan hasil penelitian terbaru yang memuat data dan fakta serta pendapat para ahli maupun pribadi penulisnya, bukan merupakan pendapat redaksi.

Redaksi berhak tidak menerima, menyingkat naskah tulisan yang dikoreksi dari segi teknis penulisan sepanjang tidak mengubah isi tulisan. Naskah tulisan dapat dikirim ke alamat redaksi, maksimum 30 (tiga puluh) halaman A4 dan dikirim melalui E-mail: ejournalham@gmail.com/pusbangdatin@gmail.com serta wajib meng-upload tulisan tersebut melalui Open Journal System (OJS) pada e-journal.balitbangham.go.id.

DAFTAR ISI

Interpretasi HAM dalam Ideologi Pancasila dan Implikasinya Terhadap Persatuan dan Kesatuan di Indonesia (<i>Interpretation of HAM in the Pancasila Ideology and Implications for Unity and Integrity in Indonesia</i>).....	1-14
Ario Putra	
Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia dalam Memperoleh Hak Atas Tanah di Indonesia (<i>Legal Protection of Human Rights in Obtaining Land Rights in Indonesia</i>)	15-28
Suharyono; Khalisah Hayatuddin; Muhamad Sadi Is	
Regulasi Regenerasi Petani dalam Konteks Ketahanan Pangan: Sebuah Upaya dan Jaminan Perlindungan Hak Atas Pangan (<i>Farmers' Regeneration Policy in the Context of Food Security: An Effort and Guarantee for the Protection of the Rights to the Food</i>).....	29-44
Moch. Marsa Taufiqurrohmah; Dilla Restu Jayanti	
Transplantasi Pengaturan Larangan Praktik Female Genital Mutilation melalui Studi Perbandingan Indonesia dengan Mesir (<i>Transplantation of Regulation of The Prohibition FGM Through a Comparison Study of Indonesian Law with Egypt</i>)	45-64
Yulita Dwi Pratiwi	
Peran Mahkamah Konstitusi Federal Jerman dalam Perlindungan Hak Fundamental Warga Negara Berdasarkan Kewenangan Pengaduan Konstitusional (<i>The Role of the German Federal Constitutional Court in Protecting of Fundamental Rights based on the Constitutional Complaints Authority</i>)	65-80
Tanto Lailam	
Keadilan Hak Asasi Manusia dalam Aksi Kamisan di Indonesia (<i>Human Rights Justice in Kamisan Action in Indonesia</i>)	81-96
Sabit Irfani; Ricky Santoso Muharam; Sunarso	
Reaktualisasi Hak atas Pelayanan Kesehatan Mental Pasca Pandemi Covid-19 di Indonesia: sebuah Ius Constituendum? (<i>Re-actualization of the Right to Mental Health Services After the Covid-19 Pandemic in Indonesia: An Ius Constituendum?</i>)	97-112
Zaki Priambudi; Namira Hilda Papuani; Ramdhan Prawira Mulya Iskandar	
<i>The Dilemma of Hospitality: Revisiting Indonesia's Policy on Handling Refugees Under International Law</i>	113-130
Ganesh Cintika Putri	

Tindakan Membuka Identitas Pasien Terkonfirmasi Covid-19
oleh Rumah Sakit Berdasarkan Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana
(*Act of Revealing Identity of Patient Confirmed Covid-19 by Hospitals
Based on Human Rights and Criminal Law Perspectives*)..... 131-150

Hwian Christianto; Ervin Dyah Ayu Masita Dewi

Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Jiwa
dihubungkan dengan Hak Asasi Manusia
(*State Responsibility in the Fulfillment of the Right to Mental
Health Related to Human Rights*)..... 151-166

Lefri Mikhael

BIODATA PENULIS **xix**

PENGANTAR REDAKSI

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga Redaksi dapat menerbitkan tulisan pada edisi kedua yaitu Jurnal HAM Volume 13 Nomor 1, April 2022. Seperti terbitan sebelumnya, pada edisi ini dimuat 10 (sepuluh) tulisan karya tulis ilmiah yang merupakan hasil-hasil penelitian maupun tinjauan ilmiah para peneliti dari Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM maupun penulis dari instansi lain.

Volume 13 Nomor 1, April 2022 kali ini, dibuka dengan tulisan yang mengulas tentang Interpretasi HAM dalam Ideologi Pancasila dan Implikasinya Terhadap Persatuan dan Kesatuan di Indonesia. Ada juga tulisan yang membahas Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia dalam Memperoleh Hak Atas Tanah di Indonesia, Regulasi Regenerasi Petani dalam Konteks Ketahanan Pangan: Sebuah Upaya Dan Jaminan Perlindungan Hak Atas Pangan, Transplantasi Pengaturan Larangan Praktik *Female Genital Mutilation* Melalui Studi Perbandingan Indonesia dengan Mesir, Peran Mahkamah Konstitusi Federal Jerman dalam Perlindungan Hak Fundamental Warga Negara Berdasarkan Kewenangan Pengaduan Konstitusional, Keadilan Hak Asasi Manusia dalam Aksi Kamisan di Indonesia, Reaktualisasi Hak Atas Pelayanan Kesehatan Mental Pasca Pandemi Covid-19 di Indonesia: Sebuah Ius Constituendum?, *The Dilemma of Hospitality: Revisiting Indonesia's Policy on Handling Refugees Under International Law*, Tindakan Membuka Identitas Pasien Terkonfirmasi Covid-19 oleh Rumah Sakit Berdasarkan Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana, Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Jiwa dihubungkan dengan Hak Asasi Manusia.

Kiranya tulisan-tulisan tersebut diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang HAM bagi para pembaca. Akhirnya kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI yang telah memberikan dukungan dalam penerbitan Jurnal HAM ini. Kami juga ucapkan terima kasih kepada Mitra Bestari yang telah bersedia membantu memeriksa dan mengoreksi tulisan dari para penulis. Kami juga menerima kritik dan saran dalam rangka peningkatan kualitas Jurnal HAM baik dari sisi pengelolaan *Open Jurnal System* maupun dari sisi materi tulisan. Selamat membaca.

Selamat Membaca

=REDAKSI=

HALAMAN KOSONG

**KAMI MENGUCAPKAN TERIMA KASIH KEPADA MITRA BESTARI
YANG TELAH MENELAAH NASKAH SEHINGGA DAPAT DITERBITKAN**

1. Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M.H.
Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.
Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin
3. Dr. Ani Purwanti, S.H., M.Hum.
Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro
4. Dr. Prawitra Thalib, S.H., M.H., ACI Arb.
Fakultas Hukum
Universitas Airlangga
5. Dr. Azhari Yahya, S.H., MCL., M.A.
Fakultas Hukum
Universitas Syiah Kuala
6. Nurhidayatulloh, S.H.I., Sp.PD., LL.M., M.H., M.H.I.
Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya
7. Eko Riyadi, S.H., M.H.
Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
8. Oemar Moechtar, S.H., M.Kn.
Fakultas Hukum
Universitas Airlangga
9. Ahsan Yunus, S.H., M.H.
Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin
10. Ridwan Arifin, S.H., LL.M.
Fakultas Hukum
Universitas Negeri Semarang

11. Saru Arifin, S.H., LL.M.
Fakultas Hukum
Universitas Negeri Semarang
12. Vu Cong Giao, Ph.D.
Institute of Public Policy and Law
Vietnam National University
13. Yanuar Sumarlan, Ph.D.
Instiute of Human Rights and Peace Studies
Mahidol University
14. Dr. Tomy Michael, S.H., M.H.
Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
15. Dr. Beniharmoni Harefa, S.H., LL.M.
Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional Jakarta
16. Dani Muhtada, Ph.D.
Fakultas Hukum
Universitas Negeri Semarang
17. Nurrahman Aji Utomo, S.H., M.H.
Badan Riset dan Inovasi Nasional
18. Nicken Sarwo Rini, S.H., M.H.
Badan Riset dan Inovasi Nasional

The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in writing.

This abstract sheet may be reproduced without permission or charge

Ario Putra (Sunan Kalijaga State Islamic University, Yogyakarta)

(Interpretation of HAM in the Pancasila Ideology and Implications for Unity and Integrity in Indonesia)

Human Rights Journal, Volume 13, Number 1, April 2022, page 1-14

Human values in the form of human rights are basically also contained in the Pancasila ideology. This research was conducted to provide knowledge contribution for academic development related to human rights issues in Indonesia. The method used in this research is descriptive exploratory. This research is a library research (library research), while the data collection method in this study is to classify data related to research, then analyze it. The data analysis method in this study is the method of interpretation and analysis methods. Human rights in Indonesia experience various forms of dynamics that are full of struggle in their enforcement, both rejection of human rights and the application of human rights in Indonesia. Various attempts have been made by ancestors in the past or leaders in the present, with the aim of upholding human rights in Indonesia. Human rights in Indonesia originate from and originate from the Pancasila ideology. Therefore, human rights in Indonesia receive strong guarantees because they are based on the Pancasila ideology. Unity and integrity in Indonesia will be realized if all Indonesian people can apply and realize human rights values in their lives.

Keywords: human rights; pancasila ideology; unity and integrity

Suharyono; Khalisah Hayatuddin; Muhamad Sadi Is (Muhammadiyah University of Palembang; UIN Raden Fatah Palembang)

(Legal Protection of Human Rights in Obtaining Land Rights in Indonesia)

Human Rights Journal, Volume 13, Number 1, April 2022, page 15-28

Land is philosophically needed by all living things, especially humans, really need land to maintain their lives even to the point of death, the protection of human rights in obtaining land rights is very necessary as well as in defending their land rights. Defending the land means preserving life and life. So the problem in this paper is how to protect the law on human rights in obtaining land rights in Indonesia. With the aim of knowing about legal protection for human rights in obtaining land rights in Indonesia. Therefore, to maintain and ensure legal protection of human rights in obtaining land rights in Indonesia, it has been regulated in the Constitution or the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and then specifically regulated in Law Number 5 of 1960 concerning Regulations. Basic Agrarian Fundamentals. However, it still has weaknesses in the legal protection of human rights in obtaining land rights in Indonesia. So it can be concluded that the legal protection of human rights in obtaining land rights in Indonesia still has weaknesses. The government and the DPR RI will immediately revise Law Number 5 of 1960 concerning Basic Regulations on Agrarian Principles.

Keywords: legal protection; human rights; and land rights

The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in writing.

This abstract sheet may be reproduced without permission or charge

Moch. Marsa Taufiqurrohman; Dilla Restu Jayanti (Faculty of Law University of Jember; Faculty of Agriculture University of Jember)

(Farmers' Regeneration Policy in the Context of Food Security: An Effort and Guarantee for the Protection of the Rights to the Food)

Human Rights Journal, Volume 13, Number 1, April 2022, page 29-44

There is so much recognition that food security is only determined by the availability of land, and weather. However, rapidly growing evidence suggests that farmer availability has an important role to play in meeting food security challenges. Indirectly, guaranteeing the availability of farmers is an important indicator to ensure the right to food. This article aims to discuss the extent to which farmer availability and regeneration are related to food security. This article also wants to reflect on how the availability of adequate policies on agricultural sustainability has an important meaning in guaranteeing the right to food. By using normative legal research, this article will answer several problems. First, how is the relationship between farmer regeneration and food security? Second, what is the state's responsibility to guarantee the right to food? Third, how to formulate farmer regeneration policies to maintain food security? This article clarifies that farmer availability has a significant influence on food production. This article also finds that the state has an important role in developing agricultural regulations that can guarantee food security. At its peak, this article proposes targeted policy support to enable the availability of regulations on farmer regeneration to address the challenges of food security.

Keywords: food security; right to food; farmer regeneration; agricultural land

Yulita Dwi Pratiwi (Master of Law Airlangga University)

(Transplantation of Regulation of The Prohibition FGM Through a Comparison Study of Indonesian Law with Egypt)

Human Rights Journal, Volume 13, Number 1, April 2022, page 45-64

Efforts to eliminate and prevent the practice of P2GP/FGM which are considered human rights violations against women are carried out by banning P2GP/FGM in several countries, one of which is Egypt. Meanwhile, in Indonesia, until now there is no regulation or policy to stop P2GP/FGM. Seeing the decline in the prevalence of FGM practices in Egypt, the authors are interested in analyzing the transplantation of P2GP/FGM prohibition settings through a comparative study of Indonesian and Egyptian laws. This research is a normative legal research with a conceptual approach and comparative law. Comparative law studies are conducted to get an overview of solutions to the same problems in other countries. The practice of P2GP/FGM in both Indonesia and Egypt is a practice based on ancient traditions and not for medical or religious purposes. The striking difference between the two countries in eliminating FGM practices is the commitment to regulating FGM in legal instruments in their countries. Therefore, in dealing with problems with the same root cause, Indonesia can refer to the same solution, namely by formulating legal instruments regarding P2GP/FGM as a criminal act by carrying out legal transplants that are adapted to the ideals of the Indonesian legal state.

Keywords: human rights; regulation of P2GP/FGM; comparative law; legal transplant

The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in writing.

This abstract sheet may be reproduced without permission or charge

Tanto Lailam (Muhammadiyah University, Yogyakarta)

(The Role of the German Federal Constitutional Court in Protecting of Fundamental Rights based on the Constitutional Complaints Authority)

Human Rights Journal, Volume 13, Number 1, April 2022, page 65-80

The research focuses on the role of the constitutional complaint authority of the German Constitutional Court (Bundesverfassungsgericht/ BVerfG). The research question is how BVerfG's system and role protect citizens' fundamental rights? The research aims to know the system (urgency, regulations) and the role/ performance of BVerfG in carrying out its authority. This research is normative legal research with a statutory/ regulation and case approach. The results show that BVerfG has received 240,251 (98%) cases since 1951-2020 (6,000 cases per year), with a successful application rate of approximately 2% of the total decisions. Based on the three cases analyzed, namely the decision-related global supervision, the prohibition of wearing the hijab in a legal traineeship, and the case of the European Central Bank/ECB's asset purchase program, it shows that in 2020 there is the best role in protecting the fundamental rights of citizens from court decisions that violate fundamental rights. The best practices of the BVerfG are recognition and reference in arranging the Constitutional Court in other countries from the Continental European and Anglo-Saxon legal systems. For Indonesia, it becomes a reference in adding the constitutional complaint authority to the Indonesian Constitutional Court in the future.

Keywords: *constitutional complaint; constitutional court; germany; fundamental rights*

Sabit Irfani; Ricky Santoso Muharam; Sunarso (Yogyakarta State University; Yogyakarta Ambarrukmo College of Tourism)

(Human Rights Justice in Kamisan Action in Indonesia)

Human Rights Journal, Volume 13, Number 1, April 2022, page 81-96

The study aims to analyze Thursday's struggle for action in seeking justice for human rights. This research is a type of descriptive research with a qualitative approach. Techniques used to collect data using observations, interviews, and searches of documents and archives. The subject of this study is a Thursday Action and determination of the study subject using Purposive. The results of this study show the struggle of the victims' families who never get tired, showing their longing related to the clarity provided by the government. Komnas HAM has recommended that there have been human rights violations against various cases of disappearances and acts of violence. There are indications that the perpetrators of human rights violations are not ordinary people. The state's commitment to resolving cases of human rights violations is a key variable in resolving stalled cases in the Attorney General's Office.

Keywords: *human rights; justice; kamisan action*

The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in writing.

This abstract sheet may be reproduced without permission or charge

Zaki Priambudi; Namira Hilda Papuani; Ramdhan Prawira Mulya Iskandar (Faculty of Law, University of Jember)

(Re-actualization of The Right to Mental Health Services After The Covid-19 Pandemic in Indonesia: An Ius Constituendum?)

Human Rights Journal, Volume 13, Number 1, April 2022, page 97-112

The Covid-19 pandemic has increased the need for mental health services in Indonesia. However, the government hasn't prioritized the mental health aspect in handling the pandemic. The WHO has stated that the COVID-19 pandemic has created a worldwide mental health crisis. This article aims to examine whether the fulfillment of mental health is the responsibility of the state and the urgency of the fulfillment of mental health services and how the ius constituendum for the fulfillment of the right to mental health services in Indonesia. By combining doctrinal research and Research-Oriented Reform, this article finds that based on the UDHR, ICESCR, 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Health Law, and Mental Health Law stipulate that the fulfillment of mental health services is the state's responsibility. However, Indonesia's laws haven't fulfilled facilities and access to mental health laws. The climax of this article recommends three things; first, Promulgate the Psychology Practice Bill, which regulates the development and management of human resources in the psychology profession. Second, Ratifying the Government Regulation of the Mental Health Law regulates the procedures for implementing mental health services. Lastly, this article recommends Ratify Regional Regulations to regulate mental health administration's planning, financing, and supervision.

Keywords: mental health; ius constituendum; covid-19; human rights

Ganesh Cintika Putri (School of Law University of Melbourne)

(Revisiting Indonesia's Policy on Handling Refugees Under International Law)

Human Rights Journal, Volume 13, Number 1, April 2022, page 113-130

Presidential Regulation No. 125 of 2016 is the first regulation that provides a normative framework for handling refugees and asylum seekers in Indonesia. This regulation was eagerly awaited by human rights activists because it was expected to guarantee refugee rights. However, many scholars believe this regulation only institutionalizes the existing informal practices. They consider that this regulation does not introduce any substantive changes that will ensure refugee protections. This paper analyzes the content of the Presidential Regulation including its background, structure, wording, and its aims. In addition, this study identifies the limit of the regulation in fulfilling, protecting, and respecting human rights based on ICCPR and ICESCR. This paper argues that the Presidential Regulation portrays state dilemma in fulfilling refugee rights under the ICCPR and ICESCR. On the one hand, the regulation welcomes the refugees by rescuing those who are stranded at the sea and providing accommodation during their stay. On the other hand, the Regulation treats them as a threat, limits their movement, and forbids them from work. Thus, the dilemma leads to the state's limitation on offering hospitality which affects the fulfillment of refugee rights. This paper is important to help one sees the limitation of Presidential Regulation and identifies the parts that need to be improved regarding the handling of refugees.

Keywords: refugee, ICCPR, ICESCR, hospitality, Presidential Regulation 125/2016

The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in writing.

This abstract sheet may be reproduced without permission or charge

Hwian Christianto; Ervin Dyah Ayu Masita Dewi (Faculty of Law, University of Surabaya; Faculty of Medicine, University of Surabaya)

(Act of Revealing Identity of Patient Confirmed Covid-19 by Hospitals Based on Human Rights and Criminal Law Perspectives)

Human Rights Journal, Volume 13, Number 1, April 2022, page 131-150

Hospitals face dilemma concerning covid 19 patient identity. In one side, they are imposed by obligation to secure confidentiality of patient with covid 19 but in other side they must inform patient identity to government. Act of revealing identity of patient with covid 19 taken by hospital raises debate from human rights perspective and whether it violates law or not. Normative Juridical method was used to solve this problem along with approaches of prevailing law and concepts on human rights in medical ethics and unlawful act. Result showed that act of revealing identity of patient with covid 19 based on nonmaleficence principle in bonum commune context can be lawful and fulfill human rights on behalf of covid 19 management. Based on penal code, act of revealing identity of patient with covid 19 taken by hospital is lawful in emergency setting (noodtoestand).

Keywords: hospital; covid-19; patient; human rights; criminal law

Lefri Mikhael (Faculty of Law, Sebelas Maret University)

(State Responsibility in the Fulfillment of the Right to Mental Health Related to Human Rights)

Human Rights Journal, Volume 13, Number 1, April 2022, page 151-166

The frightening global situation due to the presence of the COVID-19 pandemic has caused various problems for mankind related to health conditions, including human mental health crisis. The fulfillment of mental health as part of human rights is a logical consequence of the ratification of the International Convention on Economic, Social, and Cultural Rights by Indonesia. The state as the duty bearer is obliged to fulfill, protect and respect every existing human right, including the right to health. The function of research is to examine how the regulation of the human right to health and its relation to the right to mental health and also how the state's responsibility through the implementation of the fulfillment of mental health rights. The method applied is doctrinal legal research. The result of the analysis found that the mental health right is an integrated part of the right to health with the main responsibility for fulfilling it is the state's obligation according to the current constitution and there are several forms of concrete efforts by the State to fulfill it. Those implementation forms require efforts to increase and equalize facilities by the State for the fulfillment of mental health right maximally.

Keywords: mental health rights; implementation of state responsibility; human rights

Kata Kunci Bersumber dari Artikel

Lembar Abstrak ini Dickey Tanpa Izin dan Biaya

Ario Putra (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta)

(Interpretasi HAM dalam Ideologi Pancasila dan Implikasinya Terhadap Persatuan dan Kesatuan di Indonesia)

Jurnal HAM, Volume 13, Nomor 1, April 2022, hal 1-14

Nilai-nilai kemanusiaan berupa Hak Asasi Manusia pada dasarnya juga terdapat di dalam Ideologi Pancasila. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk memberikan sumbangsih pengetahuan bagi perkembangan akademik terkait permasalahan HAM di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (Library research) sedangkan metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan mengklasifikasikan data-data yang berhubungan dengan penelitian, kemudian menganalisisnya. Adapun metode analisis data dalam penelitian ini yaitu dengan metode interpretasi dan metode analisis. HAM di Indonesia mengalami berbagai bentuk dinamika yang penuh perjuangan dalam penegakannya, baik itu penolakan terhadap HAM maupun pengaplikasian HAM di Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan oleh para leluhur-leluhur di masa lampau ataupun pemimpin pada masa sekarang, hal tersebut bertujuan demi tegaknya HAM di Indonesia. Hak asasi manusia di Indonesia bersumber dan bermula dari ideologi Pancasila. Oleh karena itu, HAM di Indonesia mendapat jaminan kuat karena berlandaskan ideologi Pancasila. Persatuan dan kesatuan di Indonesia akan dapat terwujud apabila segenap masyarakat Indonesia dapat menerapkan serta mewujudkan nilai-nilai HAM dalam kehidupannya.

Kata Kunci: HAM; ideologi pancasila; persatuan dan kesatuan

Suharyono; Khalisah Hayatuddin; Muhamad Sadi Is (Universitas Muhammadiyah Palembang; UIN Raden Fatah Palembang)

(Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia dalam Memperoleh Hak Atas Tanah di Indonesia)

Jurnal HAM, Volume 13, Nomor 1, April 2022, hal 15-28

Tanah secara filosofis dibutuhkan oleh semua makhluk hidup terutama manusia sangat membutuhkan tanah dalam mempertahankan kehidupannya bahkan sampai meninggal dunia, perlindungan hak asasi manusia dalam memperoleh hak atas tanah sangat diperlukan begitu juga dalam mempertahankan hak atas tanahnya tersebut. Mempertahankan tanah berarti mempertahankan hidup dan kehidupannya. Maka yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini bagaimana perlindungan hukum terhadap Hak Asasi Manusia dalam memperoleh hak atas tanah di Indonesia. Dengan tujuan untuk mengetahui mengenai perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia dalam memperoleh hak atas tanah di Indonesia. Untuk menjaga dan menjamin perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia dalam memperoleh hak atas tanah di Indonesia sudah diatur di dalam Konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kemudian diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria. Akan tetapi masih memiliki kelemahan-kelemahan dalam perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia dalam memperoleh hak atas tanah di Indonesia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia dalam memperoleh hak atas tanah di Indonesia masih memiliki kelemahan-kelemahan. Pemerintah dan DPR RI segera melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Kata Kunci: perlindungan hukum; hak asasi manusia; dan hak atas tanah

Kata Kunci Bersumber dari Artikel

Lembar Abstrak ini Dickey Tanpa Izin dan Biaya

Moch. Marsa Taufiqurrohman; Dilla Restu Jayanti (Fakultas Hukum Universitas Jember; Fakultas Pertanian Universitas Jember)

(Regulasi Regenerasi Petani dalam Konteks Ketahanan Pangan: Sebuah Upaya dan Jaminan Perlindungan Hak Atas Pangan)

Jurnal HAM, Volume 13, Nomor 1, April 2022, hal 29-44

Ada begitu banyak pengakuan bahwa ketahanan pangan hanya ditentukan oleh ketersediaan lahan, teknologi, benih, iklim, dan cuaca. Namun, bukti yang berkembang pesat menunjukkan bahwa ketersediaan petani juga memiliki peran penting dalam memenuhi tantangan ketahanan pangan. Secara tidak langsung, jaminan ketersediaan petani juga menjadi indikator penting dalam menilai upaya penjaminan hak atas pangan. Artikel ini bertujuan untuk membahas sejauh mana ketersediaan petani dan regenerasinya terkait dengan ketahanan pangan. Artikel ini juga ingin merefleksikan bagaimana ketersediaan regulasi terhadap keberlanjutan pertanian yang memadai memiliki arti penting dalam menjamin hak atas pangan bagi warga negara. Dengan menggunakan penelitian hukum normatif yang dikolaborasikan dengan metode Reform Oriented Research, penelitian ini akan menjawab beberapa permasalahan. Pertama, bagaimana keterkaitan antara regenerasi petani dan ketahanan pangan? Kedua, bagaimana tanggung jawab negara dalam menjamin hak atas pangan? Ketiga, bagaimana formulasi regulasi regenerasi petani untuk menjaga asa ketahanan pangan? Artikel ini mengklarifikasi bahwa ketersediaan petani memiliki pengaruh signifikan terhadap produksi pangan. Artikel ini juga menemukan bahwa negara memiliki peran penting dalam membangun regulasi pertanian yang dapat menjamin ketahanan pangan. Puncaknya, artikel ini mengusulkan dukungan regulasi yang terarah untuk memungkinkan tersedianya regulasi tentang regenerasi petani untuk menjawab tantangan ketahanan pangan.

Kata Kunci: ketahanan pangan; hak atas pangan; regenerasi petani; lahan pertanian

Yulita Dwi Pratiwi (Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga)

(Transplantasi Pengaturan Larangan Praktik Female Genital Mutilation melalui Studi Perbandingan Indonesia dengan Mesir)

Jurnal HAM, Volume 13, Nomor 1, April 2022, hal 45-64

Upaya penghapusan dan pencegahan praktik P2GP/FGM yang dianggap pelanggaran HAM terhadap perempuan, dilakukan dengan pelarangan P2GP/FGM di beberapa negara, salah satunya Mesir. Sedangkan di Indonesia sampai saat ini belum terdapat pengaturan maupun kebijakan untuk menghentikan P2GP/FGM. Melihat penurunan prevalensi praktik FGM di Mesir, penulis tertarik menganalisis transplantasi pengaturan larangan P2GP/FGM melalui studi perbandingan hukum Indonesia dengan Mesir. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perbandingan Hukum. Studi perbandingan hukum dilakukan untuk mendapatkan gambaran solusi atas permasalahan yang sama di negara lain. Praktik P2GP/FGM baik di Indonesia maupun di Mesir merupakan praktik atas dasar tradisi kuno dan bukan untuk kepentingan medis maupun agama. Perbedaan yang mencolok kedua negara dalam penghapusan praktik FGM adalah komitmen pengaturan FGM dalam instrumen hukum di negaranya. Oleh karena itu, dalam menghadapi permasalahan dengan akar masalah yang sama, Indonesia dapat merujuk solusi yang sama, yakni dengan merumuskan instrumen hukum mengenai P2GP/FGM sebagai tindak pidana dengan melakukan transplantasi hukum yang disesuaikan dengan cita negara hukum Indonesia.

Kata Kunci: hak asasi manusia; pengaturan P2GP/FGM; perbandingan hukum; transplantasi hukum

Kata Kunci Bersumber dari Artikel

Lembar Abstrak ini Dickey Tanpa Izin dan Biaya

Tanto Lailam (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)

(Peran Mahkamah Konstitusi Federal Jerman dalam Perlindungan Hak Fundamental Warga Negara Berdasarkan Kewenangan Pengaduan Konstitusional)

Jurnal HAM, Volume 13, Nomor 1, April 2022, hal 65-80

Penelitian ini mengkaji tentang peran pengaduan konstitusional Mahkamah Konstitusi Jerman (Bundesverfassungsgericht/ BVerfG). Pertanyaan penelitiannya adalah bagaimana sistem dan peran BVerfG dalam memberikan perlindungan hak fundamental warga negara? Tujuan penelitian ini adalah mengetahui sistem (urgensi, pengaturan) dan peran/ kinerja BVerfG dalam menjalankan kewenangannya secara komprehensif. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BVerfG telah menerima 240.251 (98%) kasus pengaduan konstitusional sejak tahun 1951 – 2020 (6.000 kasus per tahun), dengan tingkat keberhasilan (putusan dikabulkan) sekitar kurang lebih 2% dari total putusan. Berdasarkan tiga kasus yang dianalisis yaitu putusan terkait pengawasan global, larangan pemakaian jilbab dalam legal traineeship, dan kasus the European Central Bank/ ECB's asset purchase program menunjukkan bahwa pada tahun 2020, BVerfG melaksanakan peran yang baik dalam perlindungan hak fundamental warga negara dari putusan pengadilan yang melanggar hak fundamental. Selain itu, peran yang baik juga dibuktikan dengan pengakuan negara lain yang menjadikannya sebagai rujukan dalam menata praktek Mahkamah Konstitusi di negaranya, baik yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental maupun Anglo-Saxon. Bagi Indonesia, tentu menjadi referensi dalam penambahan kewenangan pengaduan konstitusional bagi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia kedepan.

Kata Kunci: pengaduan konstitusional; mahkamah konstitusi; jerman; hak fundamental

Sabit Irfani; Ricky Santoso Muharam; Sunarso (Universitas Negeri Yogyakarta; Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo Yogyakarta)

(Keadilan Hak Asasi Manusia dalam Aksi Kamisan di Indonesia)

Jurnal HAM, Volume 13, Nomor 1, April 2022, hal 81-96

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perjuangan aksi kamisan dalam mencari keadilan terhadap hak asasi manusia. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data menggunakan observasi (pengamatan), wawancara, dan penelusuran dokumen serta arsip. Subjek penelitian ini merupakan Aksi Kamisan dan penentuan subjek penelitian menggunakan Purposive. Hasil penelitian ini menunjukkan perjuangan para keluarga korban yang tidak pernah lelah, menunjukkan kerinduan mereka berkaitan dengan kejelasan yang diberikan oleh pemerintah. Komnas HAM telah merekomendasikan bahwa telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia terhadap berbagai kasus penghilangan orang dan tindak kekerasan. Ada indikasi bahwa pelaku pelanggaran hak asasi manusia merupakan bukan orang biasa. Komitmen negara untuk menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia merupakan variabel kunci dalam menuntaskan kasus yang macet di Kejaksaan Agung.

Kata Kunci: hak asasi manusia; keadilan; aksi kamisan

Kata Kunci Bersumber dari Artikel

Lembar Abstrak ini Dickey Tanpa Izin dan Biaya

Zaki Priambudi; Namira Hilda Papuani; Ramdhan Prawira Mulya Iskandar (Fakultas Hukum Universitas Jember)

(Reaktualisasi Hak atas Pelayanan Kesehatan Mental Pasca Pandemi Covid-19 di Indonesia: Sebuah Ius Constituendum?)

Jurnal HAM, Volume 13, Nomor 1, April 2022, hal 97-112

Pandemi Covid-19 telah meningkatkan kebutuhan atas pelayanan kesehatan mental di Indonesia. Walaupun demikian, pemerintah belum memprioritaskan aspek kesehatan mental dalam penanganan pandemi. Padahal WHO menyatakan bahwa pandemi Covid-19 telah menciptakan krisis kesehatan mental di seluruh dunia. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji apakah pemenuhan kesehatan mental merupakan tanggung jawab negara dan apakah urgensi pemenuhan pelayanan kesehatan mental serta bagaimana ius constituendum pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan mental di Indonesia. Dengan menggabungkan metode penelitian doktrinal dan Research Oriented Reform, artikel ini menemukan bahwa berdasarkan ketentuan UDHR, ICESCR, UUD NRI 1945, UU Kesehatan dan UU Kesehatan Jiwa, pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan mental merupakan tanggung jawab negara. Namun, hak tersebut belum terpenuhi karena minimnya fasilitas serta adanya kekosongan hukum kesehatan mental di Indonesia. Puncaknya artikel ini merekomendasikan tiga hal. Pertama, mengundang RUU Praktik Psikologi yang mengatur pengembangan dan manajemen SDM di bidang profesi psikologi. Kedua, mengesahkan Peraturan Pemerintah dari UU Kesehatan Jiwa yang mengatur tata cara pelaksanaan upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dalam melaksanakan pelayanan kesehatan mental. Ketiga, mengesahkan Peraturan Daerah yang mengatur perencanaan, pembiayaan, dan pengawasan penyelenggaraan kesehatan mental.

Kata Kunci: kesehatan mental; ius constituendum; covid-19; hak asasi manusia

Ganesh Cintika Putri (School of Law University of Melbourne)

(Dilema Keramahtamahan: Menilik Kembali Kebijakan Indonesia dalam Penanganan Pengungsi Menurut Hukum Internasional)

Jurnal HAM, Volume 13, Nomor 1, April 2022, hal 113-130

Peraturan Presiden No 125 Tahun 2016 adalah peraturan pertama yang memberikan kerangka normatif terkait penanganan pengungsi dan pencari suaka di Indonesia. Regulasi ini sudah lama dinantikan oleh pemerhati hak asasi manusia karena diharapkan mampu menjamin hak-hak dasar pengungsi. Meski begitu, akademisi berargumen bahwa regulasi ini hanya melembagakan praktik penanganan yang sudah ada. Ia tidak menawarkan perubahan substansi yang dapat memastikan perlindungan pengungsi. Tulisan ini menganalisis muatan dari Peraturan Presiden termasuk latar belakang penyusunan, struktur, pemilihan kata, dan tujuan, serta mengidentifikasi batasan dalam pemenuhan, perlindungan dan penghargaan hak asasi manusia berdasarkan ICCPR dan ICESCR. Dalam analisis, tulisan ini menemukan bahwa Peraturan Presiden No 125/2016 menggambarkan dilema negara dalam memenuhi hak pengungsi berdasarkan ICCPR dan ICESCR. Di satu sisi, negara menyambut pengungsi yang terdampar di laut dan menyediakan akomodasi selama masa penampungan. Namun di sisi lain, peraturan ini memperlakukan pengungsi sebagai ancaman, membatasi pergerakan dan melarang pengungsi bekerja. Dilema negara dalam menawarkan 'keramahtamahan' pada pengungsi kemudian berpengaruh pada terbatasnya pemenuhan hak pengungsi. Tulisan ini menjadi penting untuk melihat keterbatasan peraturan yang sudah ada dan mengidentifikasi hal-hal yang harus diperbaiki dalam penanganan pengungsi.

Kata kunci: pengungsi; ICCPR; ICESCR; keramahtamahan; Peraturan Presiden No 125/2016

Kata Kunci Bersumber dari Artikel

Lembar Abstrak ini Dickey Tanpa Izin dan Biaya

Hwian Christianto; Ervin Dyah Ayu Masita Dewi (Fakultas Hukum Universitas Surabaya; Fakultas Kedokteran Universitas Surabaya)

(Tindakan Membuka Identitas Pasien Terkonfirmasi Covid-19 oleh Rumah Sakit Berdasarkan Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana)

Jurnal HAM, Volume 13, Nomor 1, April 2022, hal 131-150

Rumah sakit menghadapi dilema atas identitas pasien Covid-19. Di satu sisi rumah sakit memiliki kewajiban untuk menjamin rahasia medis pasien Covid-19 namun di sisi lain harus menginformasikan identitas pasien Covid-19 kepada pemerintah. Tindakan membuka identitas pasien Covid-19 oleh rumah sakit pun menjadi perdebatan dari sisi hak asasi manusia dan perbuatan melawan hukum atau tidak. Metode penelitian yuridis normatif digunakan untuk menjawab persoalan ini melalui pendekatan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pendekatan konseptual atas hak asasi manusia dalam etika kedokteran dan perbuatan pidana. Hasil penelitian menunjukkan tindakan membuka identitas pasien Covid-19 menurut prinsip nonmaleficence dalam konteks bonum commune dapat dibenarkan dan memenuhi hak asasi manusia demi kepentingan penanggulangan pandemi Covid-19. Menurut hukum pidana, tindakan membuka identitas pasien Covid-19 oleh Rumah Sakit merupakan tindakan yang dibenarkan dalam keadaan darurat (*noodtoestand*).

Kata Kunci: rumah sakit; covid-19; pasien; hak asasi manusia; hukum pidana

Lefri Mikhael (Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret)

(Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Jiwa dihubungkan dengan Hak Asasi Manusia)

Jurnal HAM, Volume 13, Nomor 1, April 2022, hal 151-166

Situasi global yang mengkhawatirkan akibat kehadiran pandemi COVID-19 menimbulkan berbagai permasalahan bagi umat manusia terkait kondisi kesehatan, salah satunya adalah krisis kesehatan jiwa. Pemenuhan kesehatan jiwa sebagai bagian dari hak asasi manusia adalah konsekuensi logis diratifikasinya Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya oleh Indonesia. Negara sebagai pemangku kewajiban diwajibkan untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati setiap hak asasi yang ada, termasuk hak asasi kesehatan. Tujuan analisis adalah untuk menelaah bagaimana pengaturan hak asasi atas kesehatan serta kaitannya dengan hak atas kesehatan jiwa serta bagaimana tanggung jawab negara melalui implementasi pemenuhan hak kesehatan jiwa. Tipologi analisis riset yang diaplikasikan adalah penelitian hukum doktrinal. Hasil penelitian didapati bahwa hak sehat jiwa merupakan bagian integral dari hak atas kesehatan dengan pertanggungjawaban utama akan pemenuhannya merupakan kewajiban negara menurut *ius constitutum* serta didapati terdapat beberapa bentuk upaya konkret yang dilakukan oleh Negara dalam rangka pemenuhan hak asasi tersebut. Beberapa implementasi tersebut tetap memerlukan upaya peningkatan dan pemerataan fasilitas oleh negara demi terpenuhinya hak kesehatan jiwa secara maksimal.

Kata Kunci: hak atas kesehatan jiwa; implementasi tanggung jawab negara; hak asasi manusia